



Gaya Komunikasi Kepala Desa Perempuan dalam Manajemen Konflik Di Pemerintahan Desa

Soebagdja Salim, Ike Junita Triwardhani

Prodi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 8/6/2023

Revised : 5/7/2023

Published : 14/7/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 49 - 52

Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Kepala Desa ialah posisi pemerintahan yang jarang diduduki oleh perempuan. Padahal, desa memiliki pola interaksi yang lebih intensif yang berpengaruh pada kesejahteraan warga khususnya ibu dan anak. Pola interaksi yang intensif ini, dapat menimbulkan peluang konflik yang lebih tinggi. Salah satu strategi dalam mengatasi konflik ialah dengan menggunakan komunikasi sebagai alat manajemen. Namun tiap orang memiliki gaya komunikasinya tersendiri, perempuan misalnya, memiliki naluri seorang ibu yang lembut, menyayangi, melindungi, dan cenderung menciptakan kedamaian. Berdasarkan fenomena tersebut permasalahan dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana proses manajemen konflik Kepala Desa Ranca Kalapa yang berstatus perempuan di lingkungan pemerintahan desa? (2) Bagaimana gaya komunikasi Kepala Desa Ranca Kalapa yang berstatus perempuan dalam manajemen konflik yang dilakukannya?, dan (3). Mengapa Kepala Desa Ranca Kalapa yang berstatus perempuan memilih gaya komunikasi yang ia gunakan dalam proses manajemen konfliknya? Peneliti menggunakan metode studi kasus tunggal dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah Kepala Desa Ranca Kalapa, dua aparatur Pemerintahan Desa, dan satu Kader PKK. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah teknik analisis deskriptif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Kepala Desa Ranca Kalapa membagi proses manajemen konfliknya menjadi tiga bagian, (1) proses observasi, (2) proses penyelesaian, (3) proses evaluasi. Dalam prosesnya subjek penelitian dapat menggunakan satu, bergantian, maupun mengkombinasikan beberapa gaya-gaya komunikasinya tergantung kebutuhan

Kata Kunci : Pimpinan Perempuan, Desa, Gaya Komunikasi

ABSTRACT

The Village Head is a government position that is rarely found by women. Whereas, the village has a more intensive interaction pattern that affects the welfare of the residents, especially mothers and children. This intensive pattern of interaction can lead to a higher chance of conflict. One strategy in overcoming conflict is to use communication as a management tool. But everyone has their own style of communication, women for example, have the instincts of a mother who is gentle, protects, and creates peace. Based on this phenomenon, the problems in this study are: (1) How is the conflict management process of the Ranca Kalapa Village Head who is a woman in the village environment? (2) How is the communication style of the Ranca Kalapa Village Head who is a woman in conflict management sought?, and (3). Why did the Ranca Kalapa Village Head who is a woman choose the communication style used in the conflict management process? The researcher uses a single case study method with a qualitative approach. The research subjects in this study were the village head of Ranca Kalapa, two village government officials, and one PKK cadre. Data collection techniques in this study were interviews, observation, and literature study. Data analysis technique in this research is descriptive analysis technique. From this study, it was found that the Village Head of Ranca Kalapa divided the conflict management process into three parts, (1) the observation process, (2) the settlement process, and (3) the evaluation process. In the process, research subjects can use one, alternately, or combine several communication styles depending on her needs.

Keywords : Women Leaders, Village Government, Communication Style

© 2023 Jurnal Manajemen Komunikasi Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Indonesia saat ini, sedang diramaikan dengan maraknya kemunculan tokoh-tokoh perempuan di panggung politik dan pemerintahan Indonesia, nama-nama seperti Najwa Shihab, Khofifah, Risma, Ratu Atut, Krisdayanti, Susi Pudjiastuti dan sebagainya. Namun, meskipun secara kasar gerakan dan keberadaan perempuan terlihat semakin ramai jika kita merujuk pada target dan misi ke-5.4 Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations, 2015: 17-18) dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih belum memuaskan. Dikutip dari Kompas.com (Mashabi), dari hasil penelitian yang dilakukan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) serentak 2020 kemarin, keterwakilan perempuan hanya sebesar 10,6%. Lalu, berdasarkan data hasil rilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Deputi Bidang Kesetaraan Gender, 2017: VIII) keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional DPR-RI berada pada angka 20,8%. Pada posisi pemerintahan desa, angkanya jauh lebih kecil, data KPPA-RI menunjukkan dari 78 ribu desa diseluruh Indonesia, hanya 5% desa yang memiliki kepala desa perempuan. Di Kabupaten Tangerang jauh lebih kecil, hanya 11 dari 246 desa yang dinahkodai perempuan, salah satunya Desa Ranca Kalapa. Angka-angka diatas sangat jauh dari target kesetaraan yang dibuat oleh KPPA-RI sebesar 30% dan target SDGs PBB di angka 50%.

Hambatan terbesar bagi kaum perempuan untuk terpilih dan menjabat di posisi publik ialah adanya pemahaman budaya dan adat masyarakat yang patriarkis. Desa khususnya, masih sangat didominasi oleh masyarakat tradisional yang memiliki pandangan tradisional terhadap perempuan. Perempuan dianggap tidak kompeten untuk memimpin dan mengatur jalannya pemerintahan. Padahal, berdasarkan hasil kajian Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Dalam Deputi Bidang Kesetaraan Gender, 2017: 93-94) penting adanya dorongan agar perempuan berpartisipasi dalam politik warga di tingkat desa. Karakter pola interaksi antar warga intensif khas desa yang berpengaruh pada peluang serta bentuk partisipasi politik, dan kesejahteraan mendasar desa yang bertumpu pada kesejahteraan perempuan dan anak; seperti angka kematian ibu dan anak; akses terhadap pendidikan; kesehatan; akses air bersih; merupakan alasan utamanya.

Dengan adanya pola interaksi warga yang intensif akan kebutuhan dasar, tentu membuat pemerintahan desa harus bekerja dua kali lebih keras. Tekanan lebih keras ini dapat menimbulkan peluang konflik yang lebih besar. Berdasarkan data yang dirilis tahun 2018 oleh Kementerian Sosial, 3,75% desa di Indonesia rawan konflik sosial yang bisa berujung kepada perkelahian massal. Hal ini bisa disebabkan mulai dari perbedaan adat, perebutan lahan, nepotisme, persaingan di tubuh pemerintahan desa, hingga perdebatan penggunaan dana desa. Konflik adalah hal yang wajar dalam suatu organisasi. Untuk itu, seorang pimpinan wajib memiliki keahlian lebih untuk menyelesaikan konflik, salah satunya dengan memiliki pemahaman dan keahlian manajemen konflik dan komunikasi organisasi yang baik. Salah satu hal yang dapat diterapkan agar meningkatkan keahlian mengatur dan menyelesaikan konflik menjadi lebih baik ialah dengan menerapkan strategi yang baik. Seperti pernyataan oleh Kristanto (2020: 156), ada 6 strategi yang baik untuk menangani konflik pada suatu organisasi. Salah satunya ialah menggunakan komunikasi sebagai alat manajemen. Untuk itu, penting hukumnya, bagi pimpinan agar dapat melakukan kegiatan komunikasi dengan baik.

Namun wajar jika tiap pimpinan memiliki gaya komunikasinya masing-masing. Perempuan misalnya, memiliki gaya khas seorang ibu yang lembut, menyayangi, melindungi, dan cenderung menciptakan kedamaian (Heather McGregor dalam Deputi Bidang Kesetaraan Gender, 2017: 95). Namun naluri tersebut juga dapat menjadi tantangan bagi perempuan, karena sifat naluri keibuan yang kontras dengan kebutuhan figur seorang pemimpin yang tegas. Untuk itu dalam berkomunikasi sebagai seorang pimpinan, seorang perempuan harus menghadapi 4 tantangan yang kelak akan muncul. Pertama, perempuan harus meyakinkan bawahannya bahwa ia tidak akan bersikap subjektif hanya karena dia seorang perempuan. Kedua, pemimpin perempuan harus memiliki kemampuan untuk meminimalisir kekhasan perempuan alamiahnya dalam penyelesaian persoalan dan konflik. Ketiga, pemimpin perempuan harus membekali diri dengan kemampuan perspektif yang komprehensif. Keempat, perempuan harus memiliki keseimbangan bagi perempuan dalam mengelola peran publik dan domestiknya (Muang, 2008).

Menarik untuk dilihat bagaimana seorang pimpinan perempuan memilih gaya dalam berkomunikasi khususnya dalam penyelesaian konflik. Karena dalam berkomunikasi, seorang pimpinan desa perempuan dapat memilih untuk mengurangi naluri keibuannya atau malah menggunakannya sebagai kelebihan. Linda Gunawan, ialah satu dari tujuh Kepala Desa perempuan di Desa Ranca Kalapa yang baru dilantik pada tahun 2021 silam. Ia menjadi kepala desa termuda diantara semua kepala desa yang sedang menjabat di Kabupaten Tangerang. Di usianya yang muda, tentu bukan hal yang mudah untuk memimpin, khususnya dalam melakukan manajemen konflik.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode studi kasus tunggal dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah Kepala Desa Ranca Kalapa bernama Linda Gunawan. Peneliti juga menambahkan informan tambahan agar dapat menguji validitas data, informan tersebut ialah Kepala Seksi Pemerintahan bernama Wijaya; satu Kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) bernama Hikmie Syafitrie; dan Kepala RT 04/03 Desa Ranca Kalapa bernama Bapak Budi Santoso. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini ialah teknik analisis deskriptif, dan keabsahannya diuji menggunakan metode triangulasi data

C. Hasil dan Pembahasan

Proses Manajemen Konflik Kepala Desa Ranca Kalapa di Lingkungan Pemerintahan Desa

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa subjek melakukan tiga proses utama dalam proses manajemen konflik yang dilakukan. (1) proses diagnosa konflik; yang meliputi (i) pencarian konflik; (ii) pengukuran konflik; (iii) dan analisa konflik, (2) proses penyelesaian konflik; yang dilakukan melalui (i) mediasi; (ii) perintah kerja; (iii) ancaman dan intimidasi, dan terakhir (3) proses evaluasi konflik.

Penyelesaian Konflik Kepala Desa Ranca Kalapa di Lingkungan Pemerintahan Desa

Setelah konflik terukur dan sudah dianalisa, subjek (Ibu Linda Gunawan selaku KADES Ranca Kalapa) akan masuk pada proses penyelesaian konflik. Dari wawancara dan observasi yang peneliti temukan, dalam proses intervensi / penyelesaian konflik subjek selalu mengutamakan melakukan kegiatan mediasi antar pihak yang berkonflik. Pada saat mediasi subjek berperan sebagai penengah, membiarkan tiap pihak mengeluarkan pendapat dan perasaan mereka, lalu memberi saran yang akan dimusyawarahkan hingga ada kesepakatan mufakat.

Jika tidak ditemukannya titik temu dalam mediasi, peneliti temukan bahwa subjek akan memanfaatkan posisi dan kewenangannya yang ia miliki untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi melalui perintah kerja. Terbitnya perintah kerja, keputusan pimpinan, maupun turun langsung adalah beberapa tindakan-tindakan yang subjek lakukan.

Jika adanya perintah masih belum dapat menyelesaikan konflik, dari wawancara yang peneliti lakukan, subjek akan mendesak pihak yang berkonflik/sumber konflik. Melakukan ancaman, mengintimidasi, mendesak, agar memberi dampak jera dan menghentikan konflik secara paksa. Hal ini dapat didukung dari pernyataan yang disampaikan oleh subjek terkait peristiwa penyelesaian konflik yang juga dialami oleh Ibu Hikmie Syafitrie selaku kader PKK Desa Ranca Kalapa. Dimana subjek datang ke rumah yang bermasalah, dan melakukan pengancaman dikarenakan sikap bermasalah yang membuat konflik tak kunjung usai. Meskipun demikian, patut digaris bawahi bahwa penyelesaian konflik lebih banyak selesai melalui cara mediasi.

Alasan Pemilihan Gaya Komunikasi dalam Manajemen Konflik di Lingkungan Pemerintahan Desa

Dari wawancara yang peneliti lakukan, subjek (Ibu Linda Gunawan selaku Kepala Desa Ranca Kalapa) menyampaikan bahwa alasan utama dari pemilihan gaya komunikasi yang halus dalam manajemen konflik ialah takut akan munculnya ketegangan jika menggunakan gaya komunikasi yang lebih agresif. Subjek peneliti juga menyampaikan bahwa adanya unsur ke-ibuan yang muncul dalam diri subjek dalam kegiatan pemerintahan juga menjadi salah satu faktor. Bapak Budi Santoso juga turut menyampaikan sikap keibuan yang muncul pada saat subjek melakukan berkomunikasi khususnya dalam mengevaluasi suatu konflik yang

telah terjadi. Dapat dilihat dari subjek yang sama sekali tidak pernah berteriak dan lebih sering menggunakan intonasi dan tempo berbicara yang halus dan diiringi dengan ketawa dan senyuman.

Pada kegiatan observasi, peneliti juga temukan bahwa subjek penelitian mengganti atau menggabungkan gaya komunikasi berdasarkan proses yang sedang dilakukannya untuk memaksimalkan hasil yang dapat didapatkan. Seperti sengaja menggunakan gaya komunikasi yang terbuka agar dapat memaksimalkan informasi yang dapat diterima, juga mengganti gaya menjadi lebih agresif agar dapat memaksimalkan dampak dalam penyelesaian konflik. Hal-hal tersebut peneliti dasari atas observasi peneliti yang melihat bagaimana subjek dapat mengubah intonasi, tempo, dan gerakan tubuhnya sesuai suasana dan lokasi yang sedang didiami.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa subjek penelitian; yakni Kepala Desa Ranca Kalapa yang berstatus perempuan membagi proses menjadi tiga bagian, yakni (1) proses observasi yang meliputi penemuan; pengukuran; dan analisa konflik, (2) proses penyelesaian konflik melalui mediasi; perintah kerja; atau ancaman, dan (3) proses evaluasi konflik. Subek juga dapat menggunakan satu gaya komunikasi, mengganti gaya komunikasi, maupun mengkombinasikan satu atau lebih gaya-gaya komunikasi dalam proses manajemen konflik yang dilakukannya sesuai kebutuhan dalam prosesnya. Subjek lebih memilih untuk menggunakan gaya komunikasi yang lebih halus dengan alasan untuk menghindari ketegangan lebih lanjut dan juga didasari atas kecocokan dan figur subjek sebagai seorang perempuan. Subjek juga berhasil memanfaatkan kelebihan figur keibuannya dalam menggunakan komunikasi sebagai alat manajemen konflik, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pihak disekitarnya.

Daftar Pustaka

- [1] Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Modul Jilid 1 : Kepemimpinan Perempuan Di Desa. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- [2] Kristanto, Andri. Manajemen Konflik. Gava Media, 2020.
- [3] Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Modul Jilid 1 : Kepemimpinan Perempuan Di Desa. Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- [4] Liliweri, Alo. Komunikasi Antar Personal. Prenada Media, 2017.
- [5] Kristanto, Andri. Manajemen Konflik. Gava Media, 2020.
- [6] Triwardhani, Ike Junita, et al. "Strategi Guru dalam membangun komunikasi dengan Orang Tua Siswa di Sekolah." *Jurnal Kajian Komunikasi* 8.1 (2020): 99-113.